

08

STRATEGI PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

Oleh : Bun Yamin Ramto

PENDAHULUAN

Dalam era reformasi sekarang ini ada kecenderungan masyarakat luas ingin mengadakan reformasi di segala aspek kehidupan. Namun demikian sebagai negara yang berdasarkan hukum, tentunya reformasi itu harus mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Kalaupun ada reformasi yang dibutuhkan, hendaknya merupakan peyempurnaan dan penyesuaian dengan keadaan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang sudah berlaku.

Dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia ditegaskan adanya **Catur Embanan** (empat misi) dari berdirinya Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur, yakni : **"Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial"**. Sedangkan dalam Pasal 31 dari Konstitusi tersebut dinyatakan bahwa **"setiap warga**

negara berhak mendapat pengajaran (pendidikan) nasional", yang diatur dengan Undang-undang dan Undang - undang yang dimaksudkan ini sudah ada, yaitu Undang-undang No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SPN), yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang menyiapkan peserta didik melalui upaya bimbingan, pengajaran dan/atau pelatihan untuk kehidupan di masa datang dengan tetap berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam GBHN 1998 telah

STRATEGI PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN

dikemukakan pula bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, trampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab dan produktif.

● Khusus mengenai pendidikan tinggi maka sebagai kebijaksanaan Pembangunan Lima Tahun Ketujuh telah digariskan juga dalam GBHN tadi, bahwa pendidikan tinggi terus dibina dan dikembangkan untuk menyiapkan *peserta didik* menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional, serta kemampuan kepemimpinan yang tanggap terhadap kebutuhan pembangunan serta pengembangan pengetahuan dan teknologi, berjiwa penuh pengabdian dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. Sejalan dengan itu *pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan perguruan tinggi ditingkatkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan masa sekarang dan masa depan. Kehidupan kampus dikembangkan sebagai lingkungan ilmiah yang dinamis, berwawasan budaya bangsa, bermoral Pancasila dan berkepribadian Indonesia.*

Mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan,

maka Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 menyatakan bahwa *"masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan (berpeluang) yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional"* (Pasal 47). Kemudian khusus untuk pendidikan tinggi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 tahun 1990, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 1998, yang pada dasarnya menyatakan pola tunggal pembinaan pendidikan tinggi oleh pemerintah terhadap Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta.

Dari embanan negara seperti yang digariskan dalam konstitusi Indonesia tersebut di atas, maupun dari tugas pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional menurut Undang-undang dan peraturan pemerintah, serta tujuan pendidikan nasional itu sendiri seperti yang diamanatkan oleh GBHN, maka jelaslah bahwa penyelenggaraan sistem pendidikan nasional itu dimaksudkan untuk *meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang diperlukan untuk kepentingan pembangunan bangsa dan negara sekarang maupun di masa yang akan datang. Sedangkan khusus untuk pendidikan tinggi kebijaksanaan yang akan ditempuh selain peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menguasai ilmu*

pengetahuan dan teknologi, beriman dan bertaqwa serta mempunyai kepemimpinan yang tangguh untuk pembangunan, juga hendaknya dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri melalui kegiatan penelitian dan pengembangan. Penyelenggaraannya selain oleh badan-badan pemerintah, juga masyarakat (swasta) diberi peluang yang seluas-luasnya.

Dari ketentuan-ketentuan di atas terkandung maksud bahwa pembinaan perguruan tinggi menganut *pola tunggal* yang tidak membedakan antara perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah sendiri dan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh swasta dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Perwujudan dan pembinaan pola tunggal ini sudah dilakukan oleh pemerintah melalui pembentukan *Badan Akreditasi Nasional (BAN)* dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0326/U/1994, tahun 1994, yang sudah di perbaharui dengan *SK. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 187/U/1998 dan No. 188/U/1998, yang menegaskan bahwa BAN ini merupakan badan yang independen dan tidak membedakan antara PTS dan PTN. Bagi program studi yang telah terakreditasi, maka perlakuan pemerintah sama, dan bagi yang belum terakreditasi juga pembinaannya pun sama antara*

PTS dan PTN.

Memperhatikan semua uraian di atas jelaslah bahwa penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta bukan merupakan pekerjaan yang mudah dan ringan, akan tetapi merupakan suatu usaha yang besar dan berat, namun mempunyai nilai yang sangat mulia, karena ikut serta menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas lahir dan batin untuk kesejahteraan dan kemajuan kehidupan bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu penyelenggaraan perguruan tinggi baik oleh pemerintah maupun oleh pihak masyarakat, memerlukan sistem pengelolaan yang lebih baik lagi, terpadu dan berkesinambungan, karena bukan saja untuk memenuhi tuntutan pembangunan yang ada sekarang, tetapi juga perlu memenuhi tuntutan pembangunan di masa depan. Bukan saja untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan bangsa yang sekarang ingin reformasi disegala bidang, akan tetapi juga harus dapat memperhatikan persaingan dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa-bangsa lainnya dari luar, lebih-lebih kalau dihubungkan dengan *era globalisasi* dan *era pasar bebas* (AFTA dan APEC) menjelang tahun 2020 nanti. Dengan kata lain pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di Indonesia baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, perlu mengadakan

reformasi pengelolaannya agar lebih profesional dan dapat *menjawab tantangan dan peluang* dalam *era reformasi politik, hukum dan ekonomi* sekarang ini.

KONDISI DAN SITUASI YANG DIHADAPI OLEH PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA.

Kondisi perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Indonesia secara umum belum cukup memadai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Artinya kalau dilihat dari jumlah mahasiswanya maupun jumlah lulusannya belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tenaga kerja dalam pembangunan di segala bidang dan aspek kehidupan masyarakat sekarang ini, apalagi untuk masa yang akan datang.

Angka partisipasi mahasiswa pada akhir PJPT I atau awal PJPT II menunjukkan jumlah lebih kurang 2,4 juta, yang berarti hanya $\pm 11\%$ dari jumlah penduduk yang berusia antara 19 sampai dengan 24 tahun di Indonesia, yakni kurang lebih 22 juta jiwa. Dari jumlah mahasiswa tersebut di atas ternyata terdiri dari lebih kurang 800 ribu mahasiswa ($\pm 33,3\%$) berada diperguruan tinggi negeri, sedangkan lebih kurang 1,5 juta ($\pm 62,5\%$) mahasiswa di perguruan tinggi swasta. Selebihnya adalah mahasiswa di perguruan-perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Departemen Agama dan Departemen-departemen lainnya, selain Departemen Dikbud ($\pm 4,2\%$).

Jumlah perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia sekarang adalah 52 buah, sedangkan jumlah perguruan tinggi swasta adalah tidak kurang dari 1.365 buah.

Jadi angka rata-rata jumlah mahasiswa di perguruan tinggi negeri adalah kurang lebih 15.000 per perguruan tinggi, sedangkan untuk perguruan tinggi swasta hanya kurang lebih 1.100 mahasiswa per perguruan tinggi. Sudah dapat diperkirakan betapa ketimpangan antara pembinaan perguruan tinggi oleh perguruan tinggi negeri dan oleh perguruan tinggi swasta, jika dilihat dari jumlah mahasiswanya saja. Belum lagi kalau diingat bahwa anggaran belanja perguruan tinggi negeri sepenuhnya disediakan dari APBN (walaupun masih terbatas hanya $\pm 12\%$ dari APBN untuk seluruh pendidikan), sedangkan untuk perguruan tinggi swasta sepenuhnya menggantungkan diri pada penerimaan tuisi (tuition fee) dari mahasiswa saja.

Akan lebih timpang lagi apabila angka rata-rata jumlah mahasiswa tersebut tadi dibandingkan antara wilayah-wilayah di Pulau Jawa dengan wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa, atau antara kawasan Barat Indonesia dengan kawasan Timur Indonesia pada umumnya. Semua wilayah di Pulau Jawa mempunyai perguruan tinggi swasta dengan jumlah rata-rata mahasiswa di atas angka rata-rata nasional, sedangkan untuk wilayah-wilayah di luar Pulau

Jawa semuanya di bawah angka rata-rata nasional.

Di samping itu data statistik menunjukkan bahwa setiap tahun lulusan sekolah lanjutan tingkat atas yang ingin masuk perguruan tinggi negeri rata-rata 400 ribu calon sedangkan yang diterima rata-rata hanya ± 60 ribu, yang berarti bahwa hanya $\pm 15\%$ saja. Ke mana sisanya yang sebagian besar tidak diterima, yakni $\pm 85\%$ calon mahasiswa? Inilah yang menjadi jatah dan pasaran bagi perguruan tinggi swasta. Apakah yang sebagian besar ini kurang bermutu, belum tentu, sebab penelitian membuktikan bahwa yang tidak diterima di perguruan tinggi negeri itu masih banyak sekali yang lebih berprestasi di perguruan tinggi swasta.

Tentang kualitas hasil lulusan perguruan tinggi swasta ini dapat juga dilihat dari status program studi di perguruan tinggi swasta yang bersangkutan. Secara keseluruhan perguruan tinggi swasta di Indonesia yang berjumlah **1.365** *tadi mengelola 5.665* program studi. Dari sejumlah program studi ini hanya **1.012 program studi atau 18%** yang sudah mempunyai status **DISAMAKAN**. Selebihnya yakni sebesar **1.165 program studi atau 21%** yang mempunyai status **DIAKUI**, sedangkan **yang 3.488 program studi atau 61% masih berstatus TERDAFTAR**. Di luar Pulau Jawa sedikit sekali program studi di perguruan tinggi swasta yang

mempunyai status **disamakan**; yang lebih banyak adalah program studi yang mempunyai status **terdaftar** dan hanya sebagian kecil saja yang telah **diakui**. Bahkan di Wilayah XI (Kalimantan) dan Wilayah XII (Maluku dan Irian Jaya) belum ada perguruan tinggi swasta yang mempunyai program studi yang telah **disamakan**, khususnya untuk program S1.

Secara keseluruhan perguruan tinggi, maka mengenai kualitas ini dapat pula dilihat dari perbandingan jumlah mahasiswa yang mengikuti program studi Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora dengan jumlah mahasiswa yang mengikuti program studi Teknik (*Engineering*) dan Eksakta.

Kondisi sekarang di Indonesia untuk keseluruhan perguruan tinggi, maka jumlah mahasiswa yang mengikuti program studi Eksakta adalah $\pm 19\%$, Teknik $\pm 14\%$, sedangkan program studi Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora adalah $\pm 67\%$. Kondisi ini sangat tidak seimbang, lebih-lebih kalau diingat akan kebutuhan pembangunan nasional dalam era industrialisasi dan era perdagangan bebas yang penuh dengan persaingan (*competitiveness*) akan produk barang dan jasa yang berkualitas, maka perbandingan itu seyogianya harus terbalik dan memang pemerintah Indonesia sedang mentargetkan kebalikan dari perbandingan tersebut, yakni selama PJPT II ini

ditargetkan agar 70% mahasiswa dapat mengikuti program studi Eksakta dan "Engineering" atau Teknologi, sedang hanya 30% yang diinginkan untuk mengikuti program studi Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora. Di samping itu sesuai dengan PP 57 yang telah dikemukakan di atas tadi, bahwa pendidikan tinggi itu terdiri atas **pendidikan akademik** dan **pendidikan profesional**.

Rencana pertumbuhan dan pengembangan perguruan tinggi di Indonesia secara makro dan kuantitatif adalah bahwa pada akhir PJPT II kelak, yakni pada tahun 2019, angka partisipasi mahasiswa diharapkan sudah mencapai 25% dari jumlah penduduk yang berusia 19 sampai dengan 24 tahun, yang pada waktu itu diperkirakan kurang lebih 25 juta jiwa (karena keberhasilan program keluarga berencana). Jadi jumlah mahasiswa Indonesia ada waktu menjelang berlakunya perdagangan bebas untuk negara-negara anggota APEC (tahun 2020) adalah kurang lebih dari 6 juta orang.

Dari jumlah 6 juta mahasiswa itu nanti direncanakan yang akan dikelola oleh perguruan tinggi negeri hanya $\pm 1,2$ juta mahasiswa, sedangkan $\pm 4,8$ juta mahasiswa akan dikelola oleh pihak swasta. Ini berarti bahwa daya tampung perguruan tinggi negeri akan bertambah seperdua dari yang ada sekarang, sedangkan untuk

perguruan tinggi swasta akan menjadi tiga kali dari yang ada sekarang.

Untuk mencapai target secara kuantitatif maupun secara kualitatif ini bukan hal yang mudah; memerlukan pembangunan sarana dan prasarana yang tidak sedikit; membutuhkan pembentukan dan pembinaan sejumlah tenaga dosen yang memenuhi syarat kualifikasi akademik dan profesional banyak sekali; menuntut pengadaan sejumlah besar laboratorium dengan berbagai bidang ilmu dan teknologi; menuntut pengadaan perpustakaan dan buku-buku pelajaran dan referensi yang cukup dan "up to date", serta memerlukan sejumlah kader personalia untuk pengelolaannya yang memenuhi kualifikasi secara manajerial dan profesional pula.

Sementara itu perkembangan disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang saling mempengaruhi dengan perkembangan lapangan kerja sudah akan banyak sekali berubah, bahkan **metodologi** dan **teknik-teknik pendekatannya** sudah akan lebih canggih lagi dari keadaan yang ada sekarang ini.

Semua kebutuhan yang disebutkan di atas, selama ini sudah menjadi masalah yang sangat besar dan berat bagi pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia, baik di perguruan tinggi negeri, lebih-lebih lagi di perguruan tinggi swasta. Keseluruhan masalah tadi telah menjadi hambatan yang tidak ringan

bagi semua BP-PTS selama ini untuk meningkatkan mutu para lulusannya dan untuk menambah kapasitas daya tamungnya dari tahun ke tahun. Lebih-lebih lagi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya sendiri.

Apabila rencana pemerintah tersebut di atas sungguh-sungguh akan dilaksanakan dan target yang telah digariskan akan direalisasikan, sudah barang tentu semua hambatan tersebut di atas akan menjadi tantangan dan sekaligus sebagai peluang bagi semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan tinggi di Indonesia. Baik pemerintah maupun masyarakat, perlu mencarikan jalan keuarnya dan memecahkan permasalahannya dengan sungguh-sungguh.

Di samping itu dirasakan oleh masyarakat bahwa strategi dan kebijaksanaan yang ada untuk pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia dewasa ini masih perlu *diselaraskan* (reregulasi) agar dapat memberikan jaminan akan tercapainya semua keinginan dan untuk mengejar semua ketinggalan dari bangsa-bangsa lain sebagaimana tercantum di dalam target-target yang telah dikemukakan di atas tadi. Salah satu contohnya saja adalah masalah kurikulum yang masih perlu disempurnakan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan

lapangan kerja dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia, sehingga akan benar-benar ada *keselarasan (link) dan kesepadanan (match) antara hasil produk pendidikan tinggi itu dengan lapangan kerja dalam dunia usaha.*

Sebagai gambaran tenaga kerja di Indonesia dewasa ini masih **73,1% mempunyai pendidikan tingkat SD ke bawah, 12,9% SLTP, 12,0% SLTA, 1,1% SM dan 0,9% Sarjana.**

Dari data ini dapatlah diperkirakan bahwa sebagian besar dari manajer di Indonesia masih berpendidikan di bawah sarjana atau sarjana muda (akademi) sekalipun.

Sementara itu terdapat 78.296 tenaga kerja asing (1996) yang bekerja di Indonesia yang mengambil porsi tingkat menengah keatas dengan total upah sebesar $\pm 3,29$ milyar dolar AS pertahun, sementara tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri ± 20 kali tenaga kerja asing di Indonesia yakni hampir 1,5 juta orang dengan upah yang diperoleh mereka hanya ± 600 juta dollar AS setiap tahun atau hanya $\pm 20\%$ dari jumlah yang dibawa orang-orang ke luar. Sebagai perbandingan tenaga kerja Filipina yang bekerja di luar negeri sudah dapat menghasilkan 11-12 milyar dolar AS setiap tahun (*International Herald Tribune*).

Masalah lain adalah masalah kesejahteraan dan disiplin tenaga pengajar dan peneliti, yang belum

dapat diperbaiki dengan sungguh-sungguh dalam rangka keinginan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan penelitian. Masalah kebebasan akademik serta etika intelektual yang belum juga dapat diselesaikan secara konsisten dan konsekuen, yang justru sangat diperlukan untuk kemajuan pertumbuhan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri di dalam kehidupan kampus perguruan tinggi. Inilah hal-hal yang masih perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat, khususnya masyarakat pengelola perguruan tinggi dan masyarakat pemakai hasil lulusan perguruan tinggi di Indonesia.

Kesulitan utama pada akhirnya adalah mengenai terbatasnya penyediaan anggaran/biaya baik rutin, apalagi untuk pembangunan (investasi). Namun demikian ditinjau dari banyaknya kebutuhan masyarakat akan tenaga kerja yang berkualitas dan besarnya potensi yang ingin memasuki jenjang pendidikan tinggi di Indonesia ini, maka di samping banyaknya **kendala** seperti dikemukakan di atas, juga terdapat **peluang** yang cukup besar bagi pengelola pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya bagi pengelola perguruan tinggi swasta.

Semua kendala dan peluang ini seyogianya dapat dijadikan **tantangan** bagi para pengelola perguruan tinggi swasta untuk dapat dijawab dan dicarikan **jalan keluarnya melalui perumusan**

strategi dan kebijaksanaan yang tepat, dengan rencana dan program implementasinya yang konsisten dan konsekuen, serta dengan sistem manajemen yang lebih baik dan lebih profesional pula.

▲ Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa semua masalah yang telah dikemukakan di atas tadi hanya akan dapat dipecahkan melalui strategi dan kebijaksanaan yang tepat; dengan rencana dan program yang mantap, terarah, realistis dan berkelanjutan; tersedianya alokasi biaya untuk rutin dan investasi sebagai "modal" yang cukup memadai, serta "*last but not least*" dengan sistem manajemen perguruan tinggi yang handal dan profesional, **terutama untuk perguruan tinggi swasta.**

Semuanya ini hanya akan dapat direalisasikan dengan dukungan dan dorongan dari pihak pemerintah dalam bentuk **pemberdayaan** (*empowering*) terhadap penyelenggara pendidikan tinggi oleh masyarakat di Indonesia.

LINGKUNGAN STRATEGIK.

Nasional

Secara nasional tampaknya perguruan tinggi swasta relatif masih ketinggalan dari perguruan tinggi negeri ditinjau dari masukannya, proses belajar mengajarnya, sarana prasarana yang dimilikinya, biaya rutin dan pembangunan yang tersedia.

serta dari hasil keluarannya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Namun demikian apabila dilihat dari kesempatan, potensi pasar dan peluang yang ada tampaknya **perguruan tinggi swasta mempunyai prospek yang jauh lebih baik untuk masa yang akan datang.**

Di samping itu pula, walaupun pembiaya untuk pengelolaan perguruan tinggi swasta ini pada umumnya masih serba kekurangan, namun masih terkesan bahwa penyelenggaraan suatu perguruan tinggi oleh masyarakat harus mengalami "**biaya tinggi**" ("*high cost education*"). Hal ini terutama disebabkan oleh dua faktor, yakni **faktor pertama internal** dan **kedua faktor eksternal**. Faktor internal disebabkan karena sistem manajemennya yang belum profesional, sedangkan faktor eksternal disebabkan masih panjang dan lamanya proses birokrasi dengan berbagai ketentuan yang harus diikuti oleh pihak penyelenggara perguruan tinggi swasta. Sementara itu pembinaan oleh pemerintah terhadap perguruan tinggi swasta ini baru saja mengikuti **pola tunggal**, seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 2 tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1998 serta Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 187/U/1998 dan No. 188/U/1998, tahun 1998 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Secara keseluruhan pendidikan tinggi di Indonesia masih sangat ketinggalan baik kuantitas maupun kualitasnya jika dibandingkan dengan pendidikan tinggi di luar negeri serta dengan tuntutan perkembangan lapangan kerja yang ada di dalam negeri. Hal ini tercermin dari banyaknya kesempatan kerja yang ada di Indonesia yang justru diambil oleh tenaga-tenaga asing, terutama untuk tingkatan menengah ke atas. Sementara itu telah terjadi angka pengangguran intelektual yang tinggi (12,36%), melampaui angka pengangguran pada umumnya (7,24%), sebelum terjadi krisis ekonomi. Sekarang angka pengangguran pada umumnya sudah mencapai (22%, sedangkan angka pengangguran untuk intelektual tidak akan jauh berbeda.

Situasi lingkungan strategik secara nasional ini akan menjadi lebih bersaing lagi, apabila Perguruan Tinggi Asing (PTA) dapat diizinkan masuk ikut beroperasi di Indonesia, karena kita belum siap menghadapi persaingan, sementara mereka melihat peluang dan pangsa pasar yang cukup besar; yang tidak tertampung dalam ujian saringan masuk ke perguruan tinggi negeri setiap tahun.

Regional

Secara regional maka perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya masih termasuk papan bawah. Hal ini dapat dilihat baik dari jumlah angka

partisipasi mahasiswanya, maupun dari hasil penilaian atas kualitas dan reputasi perguruan tinggi itu sendiri selama ini.

Angka partisipasi mahasiswa untuk negara-negara tetangga (ASEAN) seperti Filipina \pm 30%, Thailand \pm 28%, Malaysia \pm 14%, sedangkan Indonesia baru \pm 11%. Apalagi jika dibandingkan dengan Korea Selatan yang sudah mencapai angka partisipasi \pm 38%, sedangkan Jepang \pm 53%. Dari segi kualitas dapat dilihat dari hasil penilaian yang dilakukan oleh majalah ASIaweek akhir tahun 1997 yang lalu, yang menunjukkan bahwa perguruan tinggi di Indonesia yang tergolong terkemuka sekalipun seperti ITB, UI, GAMA, AIRLANGGA dan DIPONEGORO, hanya menduduki peringkat masing-masing ke-19, 32, 37, 38 dan 42 di Asia.

Sudah dapat dibayangkan bagaimana peringkat dari perguruan-perguruan tinggi swasta di Indonesia dewasa ini.

Selain dari pada itu, dari hasil Konferensi Regional tentang Pendidikan Tinggi (Regional Conference on Higher Education) yang diselenggarakan oleh UNESCO di Tokyo, 8-10 Juli 1997 yang baru lalu yang membahas tentang Strategi Nasional dan Kerjasama Regional untuk menghadapi abad ke-21 (National Strategies and Regional Cooperation for the 21st Century), menunjukkan bahwa negara-negara dalam kawasan Asia Pasifik ini sudah

sangat mendesak agar teknologi baru yang dicapai di dunia dewasa ini hendaknya dapat digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi di kawasan ini, seperti *multi media* dan *networking*, sehingga hal ini akan mempengaruhi *metodologi* pendidikan seperti *“distant education”* dan sebagainya. Untuk itu perlu dijalin hubungan timbal balik antara *dunia perguruan tinggi* dengan *dunia industri* agar masalah *ketenagakerjaan* yang selalu menghadapi perubahan-perubahan lapangan kerja, sebagai akibat dari kemajuan teknologi, dapat teratasi dengan baik dan dilakukan secara dinamik pula.

Global

Di negara-negara yang sudah maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman dan Perancis masalah pendidikan pada umumnya sudah menjadi isu politik, sehingga pada setiap kampanye untuk pemilihan anggota legislatif ataupun untuk memilih Presiden atau Kepala Pemerintahan, masalah pendidikan dan pelatihan selalu menjadi bahan kampanye yang utama dari partai tertentu, untuk memenangkan pemilihan dalam hubungan pemecahan masalah pengangguran di negara-negara tersebut. Bahkan salah satu faktor yang menyebabkan suksesnya Presiden Clinton karena ia berhasil melaksanakan program pendidikan dan pelatihan yang dijanjikannya pada waktu kampanye

pemilihan presiden Amerika Serikat dulu. Sedangkan di Jerman dewasa ini timbul kritik-kritik dari kalangan mahasiswa sendiri terhadap ketinggalannya pendidikan tinggi di sana, yang tidak dapat menjawab masalah pengangguran yang terus menerus meningkat.

Dewasa ini, pemerintah dan masyarakat di negara-negara tersebut sudah dan sedang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas pendidikannya, terutama pendidikan tinggi, serta telah **menyelaraskannya dan menyepadkannya** (*link and match*) dengan perkembangan dan tuntutan lapangan kerja, untuk mengurangi tekanan pengangguran yang semakin meningkat. Mereka secara terpadu antara masyarakat perguruan tinggi dengan masyarakat industri dan lapangan kerja lainnya, serta dengan organisasi-organisasi profesi yang terkait, telah berusaha bersama untuk **meningkatkan mutu pendidikan tinggi, sekaligus menyelaraskannya dengan perkembangan lapangan kerja.**

Oleh sebab itu timbullah tuntutan akan adanya **kebebasan untuk menyesuaikan program studi dengan tuntutan lapangan kerja**, sehingga di sana terdapat kecenderungan penyelenggaraan pendidikan tinggi itu menjadi terbagi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- yang bersifat akademik;
- yang bersifat profesional;
- yang berorientasi pada **penye-**

lesaian secara terpadu dari suatu produk komoditi (barang dan jasa) tertentu.

Pendidikan tinggi di negara-negara yang sudah maju bukan saja menerapkan pendidikan profesional sebagai jawaban terhadap tuntutan kebutuhan tenaga kerja, akan tetapi sudah lebih maju lagi, yakni mendirikan perguruan tinggi yang lulusannya dapat menghasilkan sesuatu produk (komoditi) tertentu (barang atau jasa) secara terpadu, dengan menggunakan pendekatan **multi disiplin** seperti "*Institute Export*" yang diselenggarakan di kota **Stuttgart**, Jerman Barat. Walaupun demikian, tingkat pengangguran di Jerman Barat masih saja meningkat dari tahun ke tahun, yang menurut pendapat para mahasiswa sendiri, antara lain disebabkan masih ketinggalannya sistem pendidikan tinggi di negara tersebut.

Di Amerika Serikat pendidikan tinggi sudah menjadi komoditi yang diperhitungkan dalam rangka pemasukan devisa negara, sebab setiap tahun perguruan tinggi di seluruh Amerika Serikat dapat menghasilkan lebih dari US\$9 milyar yang dibayarkan oleh orang asing dari seluruh dunia yang mengikuti pendidikan tinggi di AS untuk semua program studi dan semua jenjang pendidikan tinggi di sana. Namun demikian dengan adanya **krisis mata uang di Asia terhadap mata uang dolar** akhir-akhir ini, terdapat

kecenderungan mahasiswa yang belajar di Amerika Serikat kembali ke negerinya masing-masing, karena orang tuanya tidak sanggup lagi menanggung biayanya yang meningkat menjadi jauh lebih tinggi, karena mata uang dolar yang harus dibayar dikurs dengan mata uang lokal dari masing-masing negara asal mahasiswa yang bersangkutan. Dari data yang ada menunjukkan bahwa mahasiswa dari negara-negara Asia yang belajar di AS hampir **500.000 orang** dengan membawa **US\$ 7 milyar**; yang paling banyak dari **Jepang (46.000)**, kemudian disusul dari **Cina (42.000)**, **Korea (37.000)**, **India (31.000)**, **Taiwan (30.000)**, **Thailand (13.500)**, **Hongkong (11.000)**, sedangkan dari Indonesia masih tergolong sangat **kecil (< 10.000)**. Sedangkan mahasiswa dari Malaysia yang belajar di Inggris tidak kurang **dari 18.000 orang** dengan membawa hampir **£ 250 juta (US\$ 400 juta)**.

Di Amerika Serikat pendidikan tinggi sudah dapat diikuti juga oleh para kepala rumah tangga (kelompok dewasa) yang tidak sempat lagi pergi ke kampus karena kesibukan kerja, maka melalui program belajar jarak jauh (*distant learning*) mereka masih dapat meningkatkan pengetahuannya, dengan kualitas yang tidak kalah dengan program studi reguler yang diselenggarakan di kampus.

Dengan demikian pendidikan tinggi disana dapat ditingkatkan

jumlah peserta didiknya, walaupun angka partisipasi mahasiswa sudah mencapai $\pm 68\%$. Program pendidikan semacam ini sangat membantu untuk peningkatan kualitas tenaga kerja dalam era persaingan dunia dewasa ini.

Di Inggris semua mahasiswa (*domestik*) di perguruan tinggi diwajibkan untuk mempelajari bahasa-bahasa Masyarakat Eropah (EC), agar nantinya setelah mereka bekerja dalam bisnis dapat melakukan komunikasi dengan semua mitra kerja mereka dari negara-negara Masyarakat Eropah.

Di Inggris juga dalam rangka menyelaraskan tenaga kerja dengan dinamikanya lapangan kerja yang berkembang terus, maka diadakanlah pelatihan tenaga kerja yang sudah memiliki predikat akademik, melalui pelatihan berjenjang (lima tingkat) yang diselenggarakan oleh suatu badan yang khusus dibentuk untuk tujuan itu, berkerjasama dengan organisasi-organisasi profesi yang bersangkutan, melalui program yang diberi nama *National Vocational Qualifications*.

Demikianlah tinjauan sekilas tentang lingkungan strategik bagi perguruan tinggi swasta di Indonesia baik secara *nasional, regional*, maupun *global*. Dengan gambaran ini, dapatlah diketahui betapa ketinggalannya sistem pendidikan tinggi di Indonesia pada umumnya dan pendidikan tinggi swasta pada

khususnya.

Ketinggalan-ketinggalan tersebut tentunya bukan untuk dihindari oleh pihak pengelola perguruan tinggi, akan tetapi harus dikejar dengan sungguh-sungguh, kalau kita sebagai bangsa ingin maju dan sejahtera, sejajar dengan negara-negara maju di dunia. Dengan timbulnya krisis mata uang dan pasar modal yang berkepanjangan melanda negara-negara Asia Timur termasuk Indonesia dewasa ini, maka semakin jelaslah betapa masih sangat ketinggalannya kualitas SDM Indonesia untuk dapat bersaing dengan SDM dari negara-negara maju, dalam hal pemecahan masalah yang sedang dihadapi dan yang ada hubungannya dengan kepentingan dari bangsa-bangsa lainnya di dunia. Oleh karena itu perlu dirumuskan **suatu strategi yang tepat**, yang dapat dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, sebagai antisipasi terhadap persaingan tenaga kerja dalam era pasar bebas yang akan datang, baik dalam hal kemampuan akademik, profesional, maupun kemampuan manajerial.

SISTEM MANAJEMEN PERGURUAN TINGGI YANG PROFESIONAL.

Dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang telah digariskan oleh pemerintah dan kondisi perguruan tinggi seperti

yang telah dikemukakan di atas, kemudian dihadapkan kepada lingkungan strategis yang dihadapi, maka dapatlah diperkirakan bahwa persaingan perguruan tinggi dalam era pasar bebas nanti akan semakin ketat dan sukar untuk dimenangkan, kecuali melalui suatu **strategi dan kebijaksanaan yang tepat**. Dengan kata lain, apabila dapat dirumuskan dan diterapkan suatu strategi dan kebijaksanaan nasional yang tepat, maka dapat diharapkan bahwa tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan tinggi itu akan dapat wujudkan. Apabila hal yang terakhir ini yang terjadi, maka **peningkatan mutu pendidikan tinggi dan ketinggalan dibidang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara-negara maju, dapat diharapkan secara bertahap akan dikurangi**. Lebih jauh daripada itu, apabila kesenjangan antar daerah di Indonesia dapat diperbaiki, maka kerjasama regional akan dapat lebih seimbang serta akan membawa kemajuan dan kemanfaatan secara timbal balik diantara bangsa-bangsa di kawasan regional ini. Seperti telah diketahui wilayah kepulauan Indonesia sangat luas, sehingga banyak daerah yang berbatasan dengan negara-negara tetangga yang lebih maju, seperti Riau dengan Singapore, Sumatera Utara dan Kalimantan Barat dengan Malaysia, Aceh dengan Thailand, dan Nusa Tenggara dengan Australia, Sulawesi Utara dengan Philipina dan lain-lainnya.

Oleh karena itu perlu secara dini sistem manajemen pendidikan tinggi pada umumnya dan sistem manajemen perguruan tinggi swasta khususnya dapat disempurnakan, sehingga menjadi lebih profesional. *Profesional* dapat diartikan lebih *teratur, terencana, terprogram, dan didukung oleh rencana pembiayaan untuk investasi yang memadai, serta didukung pula oleh kesiapan rencana pembinaan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan manajerial* dan akademik pada tingkatannya masing-masing. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan peningkatan kemampuan dan *kesejahteraan semua tenaga pengelola, baik yang struktural maupun yang fungsional*. Dengan demikian dapatlah diharapkan *semua tenaga kerja yang terlibat dalam manajemen perguruan tinggi itu akan menjalankan profesinya dengan sungguh-sungguh, profesional, dan berkelanjutan*.

Berkelanjutan dapat diartikan bahwa strategi dan kebijaksanaan yang dirumuskan lebih mantap dan sesuai dengan aspirasi yang hidup dalam masyarakat yang berkepentingan, serta senantiasa berorientasi kepada kemajuan zaman, sehingga dapat menjamin kesinambungan pelaksanaannya dimasa-masa yang akan datang.

Kondisi sistem manajemen perguruan tinggi di Indonesia dewasa

ini belumlah sepenuhnya memenuhi persyaratan seperti yang diinginkan ini. Oleh sebab itu masih dirasa perlu untuk mengadakan perubahan-perubahan, penyempurnaan-penyempurnaan serta penyusunan *rencana* dan *program* yang lebih mantap lagi. Di bidang ekonomi dan perdagangan sudah dikenal *deregulasi* dan *debirokratisasi* untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan melancarkan perdagangan serta mendorong swastanisasi. Dengan meminjam istilah itu, tidaklah berlebihan jikalau di bidang pendidikan pada umumnya dan pendidikan tinggi khususnya, dapat dilakukan pula deregulasi dan debirokratisasi, untuk lebih menggairahkan para pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia ini di masa-masa mendatang.

Dari pembahasan di atas semakin jelaslah bahwa untuk melaksanakan sistem manajemen yang profesional pada suatu perguruan tinggi, maka pertama-tama yang diperlukan adalah rumusan yang jelas dan tegas tentang *visi* dan *misi* perguruan tinggi yang bersangkutan, sehingga *tujuan* dan *sasaran* yang akan dicapai juga menjadi lebih jelas pula. Sesudah itu barulah *disusun* dan *dirumuskan strategi* dan *kebijaksanaan* yang akan ditempuh, termasuk kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menjadi landasannya

Visi perguruan tinggi di Indonesia adalah menciptakan masyarakat

akademik yang berkualitas di segala bidang yang dapat bersaing bebas kedalam dan keluar untuk kepentingan pembangunan bangsa. Sedangkan misinya adalah untuk meningkatkan mutu lulusannya, melakukan efisiensi proses penyelenggaraannya, dan menjaga relevansinya dengan perkembangan tuntutan dunia kerja.

Berdasarkan strategi dan kebijaksanaan yang dirumuskan ini, barulah dapat disusun *rencana strategik* yang terbagi atas *Rencana Jangka Panjang (Rencana Induk)*, *Rencana Jangka Sedang* dan *Rencana Jangka Pendek*, yang masing-masing difokuskan kepada *idaman (goals)* jangka panjang, *tujuan (objectives)* jangka sedang, dan *sasaran (targets)* jangka pendek yang ketiganya perlu selalu digulirkan (*rolling*) menurut perjalanan waktu.

Setelah itu barulah dapat disusun program-program, baik jangka sedang maupun jangka pendek dengan memperhitungkan upaya yang dapat dilakukan berdasarkan kepada perkiraan dan analisis kemampuan-kemampuan yang telah dimiliki ataupun yang mungkin akan dapat dimiliki pada tahapan waktunya masing-masing. Semua kegiatan yang akan dilakukan di dalam perguruan tinggi, baik jangka sedang maupun jangka pendek (tahunan), hendaknya dapat disusun dalam pro-

gram-program ini, karena pada akhirnya *semua program itu harus dapat diterjemahkan kedalam suatu susunan anggaran tahunan*. Dengan demikian dapatlah dijamin bahwa *tidak ada sesuatu kegiatan yang tidak diprogramkan, dan tidak ada program yang tidak ada anggarannya*.

P E M B E R D A Y A A N PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA.

Dengan menyadari akan besarnya tingkat kesulitan dan besarnya tingkat pembiayaan yang dibutuhkan, maka jika *ketinggalan* dan ketimpangan tersebut di atas tadi akan dikejar, agar sumber daya manusia Indonesia menjadi *berkualitas* dan *dapat bersaing*, kiranya tidak ada jalan lain bagi *pemerintah bersama-sama dengan masyarakat*, kecuali harus merumuskan dan menjalankan suatu *strategi nasional* dengan cara *mempersatukan upaya, memadukan usaha, dan mengatur langkah bersama, agar pekerjaan yang besar, berat, tetapi mulia ini, dapat ditanggulangi secara terpadu, dilaksanakan secara bertahap*, namun dapat terjamin pelaksanaannya dan mutu hasilnya. Pemerintah dengan menyadari akan keterbatasannya dalam hal anggaran, perlu mendorong pihak *swasta* agar dapat membantu pemberdayaan (empowering) terhadap perguruan tinggi di Indo-

nesia, dengan mengeluarkan kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagai berikut :

1. Mengadakan *deregulasi* dan *debirokratisasi* penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, untuk menjamin *kemudahan, kelancaran* dan *kegairahan* para pengelola perguruan tinggi, sehingga mereka lebih bergairah dan sungguh-sungguh dapat meningkatkan mutu *lulusan*, pendidikan tinggi sesuai dengan tuntutan zaman;
2. Perlu mengadakan *reformasi terhadap kurikulum dan metode pendidikan dan pelatihan* untuk menyelaraskannya dengan tuntutan/kebutuhan perkembangan lapangan kerja, khususnya tentang relevansinya dengan sektor industri dan jasa-jasa yang senantiasa berkembang dan bersaing dalam pasaran bebas dunia;
3. Menjalin *hubungan yang saling menguntungkan* antara *para pengusaha dengan perguruan tinggi* dalam rangka menambah daya tampung dan peningkatan mutu serta relevansi *lulusan* pendidikan tinggi dengan lapangan kerja;
4. Menjalin *hubungan fungsional* antara *organisasi profesi dengan perguruan tinggi* untuk menentukan kriteria dan kurikulum pendidikan tinggi yang bermutu serta relevansinya dengan bidang profesi yang bersangkutan;
5. Mendorong adanya *kerjasama antar pendidikan tinggi swasta, antar perguruan tinggi negeri, serta antara perguruan tinggi swasta dengan perguruan tinggi negeri*, untuk saling bantu membantu dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan penelitian oleh masing-masing perguruan tinggi, dengan *prinsip yang kuat membantu yang lemah, agar proses pemerataan dapat berlangsung dengan baik*;
6. Menjalin *kerjasama dengan lembaga-lembaga yang terkait baik di dalam maupun di luar negeri*, termasuk kemungkinan untuk berkerjasama dalam hal *manajemen dan investasi dengan Perguruan Tinggi Asing (PTA)*, demi peningkatan daya tampung (kuantitas) dan peningkatan mutu pendidikan (kualitas) serta untuk memenuhi efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi itu sendiri di Indonesia;
7. Khusus untuk investasi oleh perguruan tinggi asing atau PTA ini, maka perlu *diatur oleh pemerintah suatu strategi yang tetap mengacu kepada kepentingan bangsa Indonesia*, antara lain yang menyangkut kerjasama dengan PTS atau PTN; agar komposisi kepemilikan/pengelolaannya memperhatikan prinsip saling menguntungkan.

kredibilitas dan kualitas dari PTA asal, bertujuan ***semata-mata untuk meningkatkan mutu lulusannya di Indonesia***, serta kurikulum dan program studinya yang berorientasi kepada kebutuhan lapangan kerja di Indonesia, dan tetap berpijak pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri.

Pemerintah telah menggariskan adanya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia untuk pembangunan bangsa ini. Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas seperti sekarang ini dan di masa-masa yang akan datang, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia seharusnya dapat menghasilkan ***produk barang dan jasa yang kualitasnya juga dapat disaingkan dengan produk barang dan jasa dari bangsa-bangsa lain*** dalam kawasan ini, bahkan dengan bangsa-bangsa di belahan dunia lainnya. Produk barang dan jasa yang berkualitas itu hanya dapat dihasilkan oleh dunia usaha yang mempunyai tenaga kerja yang berkualitas pula. Jadi ***para pengusaha sangat berkepentingan dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas untuk dapat bersaing dalam pemasaran produk-produk hasil usahanya***.

Sumber daya manusia yang berkualitas hanya akan dapat diperoleh melalui ***pendidikan***

(akademik) dan pelatihan (profesional) oleh perguruan tinggi yang berkualitas pula. Sedangkan perguruan tinggi yang berkualitas seperti demikian itu, hanya akan dapat dibangun melalui ***sistem manajemen yang profesional dan dengan dukungan dana investasi yang cukup memadai***. Jadi perguruan tinggi sangat membutuhkan sumber daya manusia ***yang berkualitas dan sumber dana yang cukup untuk meningkatkan kualitas lulusannya***.

Dengan kerjasama yang saling berkepentingan ini, baik antara dunia perguruan tinggi dan dunia usaha, maupun antara perguruan tinggi dan dunia profesi atau dengan lembaga-lembaga yang terkait, lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri, maka dapat diharapkan tujuan yang sangat strategik bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara ini akan dapat tercapai dengan cara yang lebih baik lagi. Dengan demikian kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara akan dapat menjadi lebih maju dan sejahtera, sejajar dengan bangsa-bangsa yang maju dan sejahtera lainnya di dunia ini.

Persaingan akan produk barang dan jasa di dunia ini selalu bertumpu pada tiga faktor utama, yakni faktor ***mutu (quality)***, ***faktor harga (price)*** dan ***faktor pelayanan (service)***. Untuk menghasilkan ketiga faktor ini harus melalui sistem manajemen yang profesional. Justru untuk ketiga

faktor inilah kondisi masyarakat Indonesia harus diakui masih harus mengejar ketinggalannya dari bangsa-bangsa mitra kerjasamanya dalam kawasan ini, maupun dari negara-negara belahan dunia lainnya. *Produk bangsa Indonesia, baik barang maupun jasa, masih memerlukan peningkatan kualitasnya, dengan jalan menambah faktor teknologi yang relevan; harga dari barang dan jasa masih perlu bersaing dengan jalan menghilangkan pengaruh faktor "high cost economy" nya; dan tingkat pelayanan masyarakat Indonesia masih perlu ditinggikan dengan jalan melakukan sistem manajemen yang lebih profesional.*

Oleh sebab itu *reformasi politik, hukum dan ekonomi* yang sedang bergulir sekarang ini sangat terkait, baik langsung maupun tidak langsung dengan *reformasi perguruan tinggi* yang diperlukan.

Secara langsung akan meliputi berbagai perubahan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi itu sendiri, seperti beberapa peraturan yang perlu dihilangkan atau disempurnakan dan beberapa prosedur yang perlu dihilangkan agar penyelenggaraan pendidikan tinggi itu akan menjadi lebih efisien dan ekonomis, serta benar-benar terdapat kebebasan kehidupan kampus. Sedangkan secara tidak langsung reformasi ekonomi akan

lebih cepat memulihkan kembali kemampuan masyarakat untuk dapat menjadi peserta didik pada perguruan-perguruan tinggi di Indonesia, sehingga angka partisipasi mahasiswa akan menjadi lebih tinggi, unit cost-nya akan menurun dan mutu lulusan akan dapat lebih ditingkatkan lagi.

KESIMPULAN.

Sejak Indonesia merdeka dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini para Pemuka Bangsa (Founding Fathers) sudah menyadari akan pentingnya misi negara yang mereka dirikan, yakni untuk *"melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial"*. Oleh karena itu mereka juga sepakat mengatur hak warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dan kewajiban pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang.

Tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia telah diatur baik dalam GBHN 1998 maupun dalam UU No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.57 tahun 1998 tentang Pendidikan Tinggi, yang pada dasarnya semua

menghendaki adanya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas bagi keperluan pembangunan bangsa sekarang maupun di masa yang akan datang.

Berbagai masalah telah menjadi kendala, sekaligus merupakan tantangan dan peluang dalam pengelolaan perguruan tinggi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, lebih-lebih yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk meningkatkan daya tampung dan menghasilkan lulusan yang bermutu dan relevan dengan tuntutan lapangan kerja. Kendala dan tantangan ini diperkirakan akan semakin besar dan berat, apalagi jika dihubungkan dengan *upaya untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia*, dalam era globalisasi dan pasar bebas, menjelang tahun 2003 dan tahun 2020 yang akan datang. Untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi itu, *diperlukan perumusan dan penerapan kebijaksanaan dan strategi baru bagi penyelenggaraan perguruan tinggi di Indonesia*. Sedangkan untuk menjamin penerapan kebijaksanaan dan strategi dimaksud diperlukan pula penerapan sistem manajemen yang profesional di lingkungan perguruan tinggi.

Dalam suatu sistem manajemen yang profesional, selain strategi dan kebijaksanaan yang jitu perlu dirumuskan pula *visi* dan *misi* yang

diemban oleh penyelenggaraan pendidikan tinggi itu sendiri. Kemudian dari itu barulah dapat disusun rencana-rencana strategi, program-program yang dapat diterjemahkan ke dalam suatu anggaran dan pendapatan yang diperlukan, yang mencerminkan semua kegiatan dan pembiayaannya yang akan dilakukan dalam rangka pengelolaan suatu perguruan tinggi di Indonesia.

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah digariskan dan mengejar ketinggalan dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka masalah *sumber daya manusia* dan *sumber dana*, termasuk *untuk investasi yang jumlahnya cukup besar, perlu menjadi perhatian utama*.

Sementara anggaran pendapatan dan belanja pemerintah masih sangat terbatas, maka *alternatif sumber dana untuk pengelolaan perguruan tinggi ini dapat di-himpun dari kemampuan masyarakat dan pengusaha swasta*, baik langsung maupun tidak langsung, dengan jalan *pemberdayaan (empowering) kepada pihak perguruan tinggi swasta*. Cara ini dapat ditempuh oleh pemerintah dengan jalan mendorong untuk bekerjasama antara dunia perguruan tinggi dengan dunia usaha, antara perguruan tinggi dengan organisasi-organisasi profesi, serta mengharuskan kerjasama antar perguruan tinggi swasta, antar

perguruan tinggi negeri, serta antara perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi negeri dengan **prinsip yang kuat membantu yang lemah**.

Di samping itu melalui reformasi terhadap berbagai peraturan yang tidak sesuai lagi dengan keadaan, pemerintah dapat memberikan jaminan dan kemudahan terhadap kemungkinan adanya **investasi** ataupun **pinjaman lunak** dari lembaga-lembaga keuangan di luar negeri. Pemerintah dapat pula memberikan **kelonggaran dan kemudahan** dalam pengaturan bagi **perguruan tinggi di Indonesia**, untuk melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi pada tingkat regional maupun global. Dengan demikian **upaya untuk mengejar ketinggalan pendidikan tinggi serta pemerataan kualitasnya dan relevansi lulusannya dengan**

perekembangan lapangan kerja di seluruh kawasan Nusantara Indonesia ini akan dapat segera menjadi kenyataan. Kerjasama regional antar perguruan tinggi dengan prinsip saling menguntungkan akan lebih mudah dilakukan. **Pemecahan masalah yang sangat strategis** melalui reformasi penyelenggaraan pendidikan tinggi ini diharapkan akan membawa **kemajuan bersama, kesejahteraan, perdamaian dan keadilan sosial** dalam pergaulan antar bangsa di kawasan ini pada abad ke-21 kelak.

Oleh sebab itu **reformasi politik, hukum dan ekonomi** yang sekarang sedang semarak dituntut oleh masyarakat luas akan sangat berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap reformasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia.

